

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 30 Januari 2023
Kepala Sub Bagian Pengelola
Keuangan dan BMN



M. Ikbal Tahalua.,S.H., M.H
NIP. 197708102003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU**

Jalan Sultan Babullah No.17 – 18, Talake, Ambon
Website : <https://maluku.kemenkumham.go.id> , email : maluku@kemenkumham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Maluku yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 30 Januari 2023
Kepala Sub Bagian Pengelola
Keuangan dan BMN



M. Ikbal Tahalua., S.H., M.Si
NIP 197708102003121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Maluku Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.613.260.149 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.14.556.345.505 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.15.002.076

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.90.915.229.186 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.258.425.808; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.90.656.803.378; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47.496.650 dan Rp.90.867.732.536

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.007.829.666, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.16.514.872.378 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(15.507.042.712) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.78.490.940 dan sebesar Rp.0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(15.428.551.772)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.93.392.286.350 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(15.428.551.772) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0.00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.12.901.363.260 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.90.867.732.536

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH MALUKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	TA 2022		Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.613.260.149	1.613.260.149	0	67.521.170
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	1.613.260.149		0	67.521.170
Belanja	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	9.252.200.000	9.018.400.543	(233.799.457)	97	8.730.314.667
Belanja Barang	B.4	5.470.626.000	5.258.726.762	(211.899.238)	96	4.962.522.754
Belanja Modal	B.5	279.250.000	279.218.200	(31.800)	100	45.462.227.145
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		0	
Jumlah Belanja		15.002.076.000	14.556.345.505	(445.730.495)	97	59.155.064.566

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH MALUKU
NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Cat.	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
1		2	3	4	5
ASET					
ASET LANCAR					
Belanj Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	246.032.787	1.888.273.445	(1.642.240.658)	(86,97)
Piutang Bukan Pajak	C.2	594.497.444	526.939.543	67.557.901	12,82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	4.579.521	(2.634.698)	7.214.219	(273,82)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.4	599.076.965	524.304.845	74.772.120	14,26
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	-	24.000.000	(24.000.000)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	-	(120.000)	120.000	(100,00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.7	-	23.880.000	(23.880.000)	(100,00)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-	-	-
Persediaan	C.9	7.813.500	6.815.000	998.500	14,65
JUMLAH ASET LANCAR		852.923.252	2.443.273.290	(1.590.350.038)	(65,09)
ASET TETAP					
Tanah	C.10	42.486.357.000	42.486.357.000	-	-
Peralatan dan Mesin	C.11	11.136.849.855	8.223.065.284	2.913.784.571	35,43
Gedung dan Bangunan	C.12	46.629.743.002	5.303.038.000	41.326.705.002	779,30
Aset Tetap Lainnya	C.13	331.320.267	331.320.267	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	-	42.386.663.917	(42.386.663.917)	(100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.15	(9.934.247.996)	(7.780.724.963)	(2.153.523.033)	27,68
JUMLAH ASET TETAP		90.650.022.128	90.949.719.505	(299.697.377)	(0,33)
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	-	90.713.032	90.713.032	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	(453.565)	(453.565)	(100,00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.18	-	90.259.467	90.259.467	(100,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	90.259.467	90.259.467	(100,00)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.19	7.750.000	-	7.750.000	-
Aset Lain-lain	C.20	1.936.725.555	1.947.395.555	(10.670.000)	(0,55)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.21	(1.937.694.305)	(1.947.395.555)	9.701.250	(0,50)
JUMLAH ASET LAINNYA		6.781.250	-	6.781.250	-
JUMLAH ASET		91.509.726.630	93.483.252.262	(1.973.525.632)	(2,11)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	47.496.650	90.965.912	(43.469.262)	(47,79)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		47.496.650	90.965.912	(43.469.262)	(47,79)
JUMLAH KEWAJIBAN		47.496.650	90.965.912	(43.469.262)	(47,79)
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.23	91.462.229.980	93.392.286.350	(1.930.056.370)	(2,07)
JUMLAH EKUITAS		91.462.229.980	93.392.286.350	(1.930.056.370)	(2,07)
JUMLAH EKUITAS		91.462.229.980	93.392.286.350	(1.930.056.370)	(2,07)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		91.509.726.630	93.483.252.262	(1.973.525.632)	(2,11)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR WILAYAH MALUKU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL		0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.2	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	D.3	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	D.4	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	D.5	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	D.6	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	D.7	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	D.8	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	0	0	0
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	D.9	24.367.404	36.194.802	(11.827.398)	(0,33)
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	D.10	1.051.020.163	-	1.051.020.163	(1,00)
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	D.11	300	-	300	0,089
Jumlah Pendapatan negara Bukan Pajak Lainnya		1.075.387.567	36.195.102	1.039.192.465	28,71
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.075.387.567	36.195.102	1.039.192.465	28,71
PENDAPATAN HIBAH		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		1.075.387.567	36.195.102	1.039.192.465	28,71
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai					
5111111 Beban Gaji Pokok PNS	D.12	6.161.428.844	5.942.485.240	218.943.604	0,037
5111119 Beban Pembulatan Gaji PNS	D.13	102.819	97.101	5.718	0,059
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	D.14	422.551.020	399.204.540	23.346.480	0,058
511122 Beban Tunj. Anak PNS	D.15	120.518.324	112.065.410	8.452.914	0,075
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	D.16	389.839.600	394.340.000	(4.500.400)	(0,011)
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	D.17	253.030.000	232.446.000	20.584.000	0,089
511125 Beban Tunj. PPh PNS	D.18	17.974.038	19.289.522	(1.315.484)	(0,068)
511126 Beban Tunj. Beras PNS	D.19	354.713.160	338.418.660	16.294.500	0,048
511129 Beban Uang Makan PNS	D.20	1.058.301.000	1.077.706.000	(19.405.000)	(0,018)
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	D.21	188.645.000	184.954.657	3.690.343	0,020
512211 Beban Uang Lembur	D.22	38.807.000	37.243.000	1.564.000	0,042
Jumlah Beban Pegawai		9.005.910.305	8.738.250.130	267.660.675	0,031
Beban Persediaan					
5931111 Beban Persediaan Konsumsi	D.23	186.423.080	179.495.751	6.927.329	0,039
Jumlah Beban Persediaan		186.423.080	179.495.751	6.927.329	0,039
Beban Barang dan Jasa					
5211111 Beban Keperluan Perkantoran	D.24	967.172.030	875.248.784	91.923.246	0,105
5211114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	D.25	2.049.500	3.483.500	(1.434.000)	(0,412)
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	D.27	214.800.000	238.700.000	(23.900.000)	(0,100)
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	D.28	257.706.000	193.576.124	64.129.876	0,331
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	D.29	3.255.630	3.162.910	92.720	0,029
521211 Beban Bahan	D.30	162.487.200	175.085.390	(12.598.190)	(0,072)
521213 Beban Honor Output Kegiatan	D.31	20.400.000	97.300.000	(76.900.000)	(0,790)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	D.32	55.800.000	191.350.600	(135.550.600)	(0,708)
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	D.33	-	81.600.000	(81.600.000)	(1,000)
522111 Beban Langganan Listrik	D.34	300.479.051	126.979.140	173.499.911	1,366
522141 Beban Sewa	D.35	1.459.793.623	1.250.843.360	208.950.263	0,167
522151 Beban Jasa Profesi	D.36	21.600.000	22.200.000	(600.000)	(0,027)
522191 Beban Jasa Lainnya	D.37	2.400.000	35.956.250	(33.556.250)	(0,933)
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	D.38	1.196.000	33.105.500	(31.909.500)	(0,964)
Jumlah Beban Barang dan Jasa		3.469.139.034	3.328.591.558	140.547.476	0,042
Beban Pemeliharaan					
5231111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	D.39	26.274.000	16.686.000	9.588.000	0,575
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	D.40	635.431.831	386.176.725	249.255.106	0,645
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	D.41	20.960.000	4.000.000	16.960.000	4,240
Jumlah Beban Pemeliharaan		682.665.831	406.862.725	275.803.106	0,678
Beban Perjalanan Dinas					
5241111 Beban Perjalanan Biasa	D.42	936.071.366	616.003.884	320.067.482	0,520
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	D.43	74.100.000	103.050.000	(28.950.000)	(0,281)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		1.010.171.366	719.053.884	291.117.482	0,405
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.44	0	0	0	0
Beban Bunga	D.45	0	0	0	0
Beban Subsidi	D.46	0	0	0	0
Beban Hibah	D.47	0	0	0	0
Beban Bantuan Bantuan Sosial	D.48	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi					
5911111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	D.49	1.016.447.637	593.445.860	423.001.777	0,713
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	D.50	1.147.725.396	321.191.293	826.534.103	2,573
592115 Beban Amortisasi Software	D.51	968.750	-	968.750	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		2.165.141.783	914.637.153	1.250.504.630	1,367
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih					
5942111 Beban Penyisihan Piutang PNPB	D.50	(4.579.521)	2.634.698	(7.214.219)	(2,738)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(4.579.521)	2.634.698	(7.214.219)	(2,738)
Beban Transfer	D.51	0	0	0	0
Beban Lain-lain	D.52	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN		16.514.872.378	14.289.525.899	2.225.346.479	0,15573
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15.439.484.811)	(14.253.330.797)	(1.186.154.014)	0,08322
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.53	0	(94.871.750)	94.871.750	(1,000)
Beban Pendapatan Aset Non Lancar		0	-	-	-
5961111 Beban Kerugian Pelepasan Aset	D.54	0	94.871.750	(94.871.750)	(1,000)
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	94.871.750	(94.871.750)	(1,000)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.55	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.56	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		605.430.483	10.306.368	595.124.115	57,743
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	D.57	(32)	8.645.700	(8.645.732)	(1,000)
425912 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	D.58	(78.490.908)	1.660.668	(80.151.576)	(48,265)
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	D.59	(526.939.543)	0	(526.939.543)	0
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(605.430.483)	10.306.368	(615.736.851)	(59,743)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.60	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		605.430.483	(84.565.382)	689.995.865	(8,1593)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.834.054.328)	(14.337.896.179)	(496.158.149)	0,0346
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.61	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	D.62	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(14.834.054.328)	(14.337.896.179)	(496.158.149)	0,0346

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH MALUKU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		Cat.	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
EKUITAS AWAL		E.1	93.392.286.350	47.725.507.703	45.666.778.647
SURPLUS/DEFISIT LO		E.2	(11.346.393.864)	(14.337.896.179)	2.991.502.315
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0	0
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURUANGI EKUITAS	E.3.1	2.634.698	94.786.805	- 92.152.107
	PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0	0
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0	0
	KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	0	0	0
	SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	0	0	0
	KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	0	94.681.706	- 94.681.706
391116	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		0	94.681.706	- 94.681.706
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		0	-	-
	LAIN-LAIN	E.3.7	2.634.698	105.099	2.529.599
391119	Koreksi Lainnya		2.634.698	105.099	2.529.599
	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		13.015.502.727	59.909.888.021	45.666.778.647
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		14.556.345.505	59.155.064.566	-44.598.719.061
313121	Diterima dari Entitas Lain		(1.613.260.149)	(67.521.179)	- 1.545.738.970
313211	Transfer Keluar		(114.139.467)	0	- 114.139.467
313221	Transfer Masuk		72.417.371	822.344.625	- 749.927.254
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.3.8	(1.930.056.370)	45.666.778.647	-47.596.835.017
	EKUITAS AKHIR	E.3.9	91.462.229.980	93.392.286.350	(1.930.056.370)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum, Profil dan Rencana Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05.2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pertama kali dibentuk pada Tahun 1982 yang keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah pada saat itu membawahi beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis), diantaranya Sekretariat/Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi, Balai Harta Peninggalan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA) yang Wilayah Meliputi Maluku dan Maluku Utara (sebelum pemekaran) dengan Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Maluku Pertama Bapak *RADJO HARAHAP, SH* (Mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku) dan dibantu oleh Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi (KORMIN) Bapak *KASDOJO DJOJOWARSITO, Bc.Im* (Mantan Kakawil Dit. Jen Imigrasi Ambon) untuk Kanwil Type B sedangkan Kanwil Type A dibantu oleh KORMIN, KORPAS dan KORIM. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dimana belum ada bidang yang menangani permasalahan HAM di Daerah. Seiring dengan berjalannya waktu nomenklatur Kantor Wilayah mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan pemerintahan di era reformasi antara lain :

- a. Pada Tahun 2000 nomenklatur Departemen Kehakiman RI berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku berubah menjadi Kantor Wilayah Hukum dan Perundang-Undangan Maluku.

b. Masih pada tahun 2000 nomenklatur Departemen Hukum dan Perundang-Undangan berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan demikian nomenklatur berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Maluku.

Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka unit Pelaksana Teknis Sekretariat/Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dipisahkan dari Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun yang sama (2005) nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga nomenklatur Kanwil berubah lagi menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terbentuk empat Divisi masing-masing :

- a) Divisi Administrasi (ex KORMIN)
- b) Divisi Pemasyarakatan (ex KORPAS)
- c) Divisi Keimigrasian (ex KOORIM)
- d) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor

Wilayah terdiri atas beberapa Divisi dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan teknis dan dukungan administrasi dilingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah;
3. Divisi Keimigrasian, mempunyai tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan,

pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 terdapat perubahan identitas entitas akuntansi. Satuan Kerja perwakilan Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Daerah mengalami perubahan kode Satuan Kerja dan Kode Eselon I dari semula :

1. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 03 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk UPT Administrasi Hukum Umum (Balai Harta Peninggalan);

2. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 05 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara);

01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 06 (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk UPT Keimigrasian (Perwakilan Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Maluku. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Maluku adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Selama periode berjalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Memiliki telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 3 kali dan revisi dan Anggaran Belanja Barang (52) Pagu pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp.1.179.236.000 sehingga hanya Rp.15.002.076.000 dari pagu Awal 16.144.337.000. hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksana anggaran, Perubahan RPD pada Hal III Dipa dan Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran) yang langsung disimpan untuk kebutuhan mendadak seperti ancaman Covid-19.

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9.245.225.000	9.252.200.000
Belanja Barang	6.619.862.000	5.470.626.000
Belanja Modal	279.250.000	279.250.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	16.144.337.000	15.002.076.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.1.613.26
0.149

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.613.260.149 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berasal dari Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari Sewa Rumah Dinas, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berasal dari Hasil Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dari Pengadaan Barang dan Jasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa keterlambatan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu dari beban pembulatan Gaji PNS, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Hasil Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Butki Pertanggungjawaban BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku tidak memadai dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Hasil Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dari Pengadaan Barang dan Jasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan dan Kelebihan Belanja Modal atas Konstruksi Pembangunan Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	24.367.404	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	983.462.262	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78.490.908	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	526.939.543	0
Pendapatan Lain-lain	0	-	0
Jumlah	0	1.613.260.149	0

Realisasi Pendapatan Semester II Tahun Anggaran 2022 mengalami Kenaikan sebesar 3165,35% di bandingkan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya

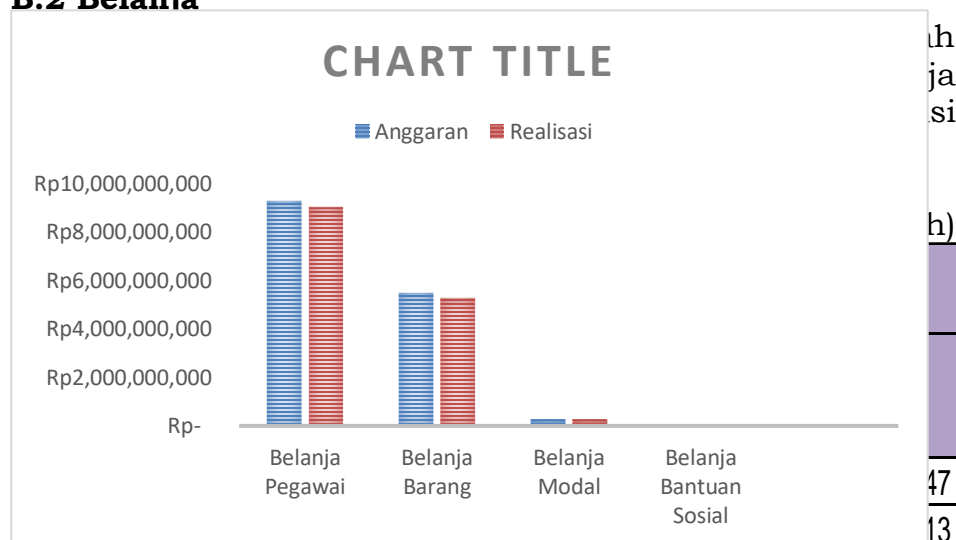
Pendapatan dan Penerimaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Belanja Modal Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	24.367.404	18.079.035	34,78
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	983.462.262	21.019.700	4578,76
Pendapatan Lain-Lain	605.430.483	10.306.668	5774,16
Pendapatan Lain-Lain II	0	0	0
Jumlah	1.613.260.149	49.405.403	3165,35

Realisasi Belanja Rp.14.556.345.505

B.2 Belanja



Belanja Modal	279.250.000	279.218.200	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	15.002.076.000	14.556.345.505	97,03
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	15.002.076.000	14.556.345.505	97,03

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 97 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Komposisi Anggaran dan Realisasi Periode 31 Desember 2022

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Pegawai	9.252.200.000	9.018.400.543	2,59
Belanja Barang	5.470.626.000	5.258.726.762	4,03
Belanja Modal	279.250.000	279.218.200	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	15.002.076.000	14.556.345.505	3,06

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp.9.018.400.543*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.018.400.543 dan Rp.8.730.314.667. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 3.30 persen dibandingkan dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan pegawai Non PNS dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.916.384.867	7.630.115.546	3,75
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	104.359	97.064	7,52
Belanja Lembur	38.807.000	37.243.000	4,20
Belanja Uang Makan PNS	1.070.176.000	1.065.006.000	0,49
Jumlah Belanja Kotor	9.025.472.226	8.732.461.610	3,36
Pengembalian Belanja Pegawai	(7.071.683)	(2.116.043)	220,38

Belanja
Barang
Rp.5.258.726.762

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.258.726.762 dan Rp5.013.320.685 Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 5.97% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
3. Peningkatan Perjalanan Dinas Pegawai ke UPT Daerah dan Pusat untuk peningkatan performa Kantor Wilayah.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	%
Belanja Barang Operasional	1.444.983.160	1.314.171.318	9,95
Belanja Barang Non Operasional	236.187.200	545.335.990	(56,69)
Belanja Jasa	1.694.797.625	1.805.788.086	(6,15)
Belanja Pemeliharaan	706.703.631	407.722.725	73,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.010.171.366	719.053.884	40,49
Belanja Persediaan	165.883.780	170.450.751	(2,68)
Jumlah Belanja Kotor	5.258.726.762	4.962.522.754	5,97
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	5.258.726.762	4.962.522.754	5,97

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2022

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan COVID-19	5.184.000	3.255.630
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	49.364.000	49.364.000
522102	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.654.000	1.196.000
	Jumlah Belanja	56.202.000	53.815.630

Belanja
Modal

B.5 Belanja Modal

Rp.279.218.200

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.279.218.200 dan Rp.45.462.227.145. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar -99.39%. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 Mengalami Penurunan sebesar -99.39% dari Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022. Dikarenakan anggaran pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran 2021 karena sesuai dengan kebutuhan operasional kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.218.200	1.028.033.600	(72,84)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	44.434.193.545	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	279.218.200	45.462.227.145	-99,39
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	279.218.200	45.462.227.145	-99,39

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja
Modal
Tanah Rp.0.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan dan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp.279.218.200, mengalami penurunan sebesar -72.84 persen bila dibandingkan dengan realisasi

Rp.279.218.200 TA 2021 sebesar Rp.45.462.227.145. Dikarenakan anggaran pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran 2021 karena sesuai dengan kebutuhan operasional kantor.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	%
Mesin Penghitung Uang	1.390.000	0	0
Mesin Absensi	5.500.000	0	0
Workstation	272.328.200	0	0
Peralatan dan Mesin	0	1.028.033.600	0
Jumlah Belanja Kotor	279.218.200	1.028.033.600	-72,84
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	279.218.200	1.028.033.600	-72,84

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.44.434.193.545. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar -100 persen dibandingkan Realisasi TA 2021. dikarenakan Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak ada pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	44.434.193.545	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
Jumlah Belanja	0	44.434.193.545	0

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tidak terdapat Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	45,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	45,00

Belanja Bantuan Sosial Rp.0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tidak Terdapat Realisasi Anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0.00

Aset Lancar Rp.852.923.252

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.852.923.252 dan Rp.2.443.273.290

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021 (dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 8100124088921000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	0	0
-	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	1.500.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	12.500.000	2.000.000
Kas Lainnya dari Hibah	17.500.000	5.500.000
Jumlah	35.000.000	9.000.000

Piutang Bukan Pajak
Rp.594.497.444

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.594.497.444. dan Rp.526.939.543 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang PNB	594.497.444	0
Piutang Lainnya	0	526.939.543
Jumlah	594.497.444	526.939.543

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31
Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar
Rp.0 dan Rp.24.000.000

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian
sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Ronald Stefanus Tuasun	0	24.000.000
	Jumlah	0	24.000.000

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp.0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.		0	0
2.		0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp.0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.(120.000), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp.246.032.787

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.246.032.787 dan Rp.1.888.273.445.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembayaran Belanja Modal Bayar di Muka	0	1.520.590.085
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	246.032.787	
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	367.683.360
Jumlah	246.032.787	152.320.000

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp.0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima

TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp.7.813.500

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.7.813.500 dan Rp.6.815.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	7.813.500	6.815.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	7.813.500	6.815.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp.90.650.022.128

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.90.650.022.128 dan Rp.90.949.719.505.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Maluku berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.42.486.357.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.42.486.357.000 dan Rp.42.486.357.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	42.486.357.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0)
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	42.486.357.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	42.486.357.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2022

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	850 m2	Jl. Sultan Babullah No 17-18 Ambon	40.182.169.000
2	5,000 m2	Jl. Ir.M.Putuhena Poka Ambon	5.068.250.000
3	30,000 m2	Tiakur Kabupaten MBD	600.000.000
4	30,000 m2	Sifanan Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB	750.000.000
5	1,325 m2	Jl. Petra Karpan	2.833.986.000
6	3000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo	1.988.528.000
7	600 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar	839.808.000
8	10000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo	6.628.428.000
9	200 m2	Jl.Pintu Ina Karpan	521.746.000
10	1146 m2	Jl. Pintu Ina Karpan	2.960.054.000
11	400 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar	480.549.000
12	168 m2	Gadihu	309.901.000
13	168 m2	Gadihu	309.901.000
14	168 m2	Gadihu	309.901.000
15	150 m2	Passo	97.460.000
16	6000 m2	Passo	10.946.559.000
Jumlah			74.827.240.000

Peralatan dan Mesin

Rp.11.136.849.855

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.11.136.849.855 dan Rp.8.223.065.284.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	8.223.065.284
Mutasi tambah:	
Pembelian	279.218.200
Hibah	0
Transfer Masuk	2.655.886.371
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	21.300.000
Transfer Keluar	21.320.000
Penghentian aset dari penggunaan	(1.936.725.555)
Saldo Per 31 Desember 2022	11.136.849.855
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(7.335.892.595)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	3.800.957.260

Gedung dan Bangunan

Rp46.629.743.002

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.46.629.743.002 dan Rp.5.303.038.000

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2022

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	5.303.038.000
Mutasi tambah:	43.998.509.002

Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2022	49.301.547.002
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2.671.804.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	46.629.743.002

Mutasi Tambah :

Pengembangan melalui KDP merupakan hasil dari Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku senilai RP.43.998.509.002

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Aset Tetap Lainnya
Rp.331.320.267

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.331.320.267 dan Rp.331.320.267 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	331.320.267
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	331.320.267
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	331.320.267

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.42.386.663.917 .

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(9.934.247.996)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(9.934.247.996) dan Rp.(7.780.724.963)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.158.169.855	21.320.000	11.136.849.855
2	Gedung dan Bangunan	49.301.547.002	2.671.804.000	46.629.743.002
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		60.459.716.857	2.693.124.000	57.766.592.857

Piutang Jangka
Panjang
Rp.0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.90.713.032

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Maluku merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0.

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.90.713.032

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-----	--------	------------	------------

-	-	0	90.713.032
	Jumlah	0	90.713.032

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0.

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0.

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.(453,565).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2022*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp.6.781.250

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.6.781.250 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Maluku terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp.7.750.000

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.7.750.000 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Maluku berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor di Bidang Pelayang Hukum khususnya Subbidang Pelayanan AHU untuk operasional kegiatan Apostile. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	7.750.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	7.750.000
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	7.750.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	7.750.000

Mutasi tambah:

Transfer Masuk berupa aplikasi Microsoft Office pada Komputer operasional Apostile Subbidang Pelayanan AHU Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Microsoft Office	7.750.000
	Jumlah	7.750.000

Aset Lain-Lain

Rp.1.936.725.555

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.1.936.725.555 dan Rp.1.947.395.555 Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Maluku.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	1.947.395.555
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	10.670.000
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2022	1.947.395.555
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	(1.936.725.555)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp.(1.937.694.305)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(1.937.694.305) dan Rp(1.947.395.555). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Kewajiban Jangka Pendek Rp.0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Maluku per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN Rp10.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp10.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
	Total	0

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum

diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
-	0
Jumlah	0

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp.47.496.650*

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.47.496.650 dan Rp.47.496.650, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	2022	2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	47.496.650	90.965.912
Jumlah	47.496.650	90.965.912

*Ekuitas
Rp.91.462.229.980*

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.91.462.229.980 dan Rp.93.392.286.350. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.1.075.387.567 dan Rp.36.195.102. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2022 dan 2021*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	24.367.404	36.194.802	(33)
Pendapatan Lain-lain	0	300	-100

*Pendapatan
PNBP
Rp.1.075.387.567*

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.051.020.163	0	0
Jumlah	1.075.387.567	36.195.102	26.84

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp.8.958.414.155*
5

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.8.958.414.155 dan Rp.8.738.250.130. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2022	TH 2021	%
Beban Gaji	6.160.193.744	5.943.001.840	4
Beban Tunjangan-tunjangan	1.747.198.608	1.682.349.132	4
Beban Pembulatan Gaji PNS	102.803	97.101	6
Beban Uang Makan PNS	1.012.112.000	1.077.706.000	
Beban Lembur	38.807.000	37.243.000	4
Jumlah	8.958.414.155	8.740.397.073	2

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp.186.423.080*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.186.423.080 dan Rp.179.495.751 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2022	TH 2021	%
Beban Persediaan Konsumsi	186.423.080	179.495.751	4
Beban Persediaan pita cukai, materai dan legas	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	20.960.000	4.000.000	424
Jumlah	207.383.080	183.495.751	13

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp.3.469.139.034*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.469.139.034 dan Rp.3.328.591.558. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	967.172.030	875.248.784	10,50
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	2.049.500	3.483.500	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	214.800.000	238.700.000	(10,01)
Beban Barang Operasional Lainnya	257.706.000	193.576.124	
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	3.255.630	3.162.910	
Beban Bahan	162.487.200	175.085.390	(7,20)
Beban Honor Output Kegiatan	20.400.000	97.300.000	(79,03)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	55.800.000	191.350.600	(70,84)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	81.600.000	
Beban Langganan Listrik	300.479.051	126.979.140	136,64
Beban Langganan Telepon	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Sewa	1.459.793.623	1.250.843.360	17
Beban Jasa Profesi	21.600.000	22.200.000	(2,70)
Beban Jasa Lainnya	2.400.000	35.105.500	(93,16)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.196.000	33.105.500	
Jumlah	3.469.139.034	3.327.740.808	4,25

Beban
Pemeliharaan
Rp682.665.831

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.682.665.831 dan Rp.406.862.725. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.274.000	16.686.000	57,46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	635.431.831	386.176.725	64,54
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	661.705.831	402.862.725	64,25

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.1.010.171.366
6

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.010.171.366 dan Rp.719.053.884. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
Beban Perjalanan Biasa	936.071.366	616.003.884	51,96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.100.000	103.050.000	-28,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Jumlah	1.010.171.366	719.053.884	40,49

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	(0.00)
Jumlah Beban	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.2.165.141.783

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.165.141.783 dan Rp.914.637.153. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	512.068.375	593.445.860	(13,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	573.862.704	321.191.293	78,67
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	1.085.931.079	914.637.153	19
Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.085.931.079	914.637.153	19

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp.(579.521)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(4.579.521) dan Rp.2.634.698 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-4.579.522	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-2.634.698	2.634.698	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	-105.099	0	#DIV/0!
Jumlah	-7.319.319	2.634.698	(377,80)

Kegiatan Non Operasional
Rp.605.430.483

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.605.430.483 dan Rp.10.306.368 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak lain/Pihak Ketiga	0	0	#DIV/0!
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	32	8.645.700	(100,00)
Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	78.490.908	1.660.668	
Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL	526.939.543	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	605.430.483	10.306.368	5.774

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Nihil Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.93.392.286.350*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.93.392.286.350 dan Rp.47.725.507.703

*Defisit LO
Rp.(14.834.054.328)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(14.834.054.328) dan Rp.(14.337.896.179) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp.0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(3.198.743.543) dan Rp.94.681.706 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	(0)
Jumlah	(0)

Koreksi Lain-lain Rp115.000.000

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp115.000.000 dan Rp184.000.000.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2022

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	42.500.000
Koreksi Pendapatan	31.100.000
Koreksi Piutang	21.400.000
Koreksi Kewajiban	15.000.000
Koreksi Hibah	5.500.000
Jumlah	115.000.000

Transaksi Antar Entitas Rp.2.634.698

E.5. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.2.634.698 dan Rp.105.099 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Koreksi Penyisihan Piutang	2.634.698
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2.634.698

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp(1.613.260.149) sedangkan DKEL sebesar Rp.14.556.345.505

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.72.417.371 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2022

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Ditjen AHU	72.417.371
Jumlah			72.417.371

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Pengesahan Hibah Langsung TA 2022

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Ekuitas Akhir
Rp.91.462.229.98
0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.91.462.229.980 dan Rp.93.392.286.350

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

➤ Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Kantor Wilayah Maluku sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (**H. M ANWAR N, S.Sos., M.H**)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (**GERRY SANDRO MAILOA., S.H**)
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (**Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H**)
4. Bendahara Pengeluaran (**MAICHEL WILLIAM HUWAE, S.H.**)

Pada Tahun Anggaran 2022 ada Pergantian Pejabat di Kantor Wilayah Maluku di bulan Februari 2022 yaitu :

1. Kepala Kantor Wilayah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dari **Drs. ANDI NURKA, S.H., M.H** ke **H. M ANWAR N, S.Sos.,M.H**
2. Kepala Divisi Administrasi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yaitu dari **Agung Rektono Seto, S.H., M.H** ke **La Margono, S.H., M.H** (Penunjukan PPSPM sementara) dikarenakan Permintaan Anggaran untuk Kegiatan di Kantor Wilayah Maluku. 01 April 2022 telah digantikan menjadi **Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H.**

- Aset tak berwujud sebesar Rp.7.750.000 transfer masuk dari DITJEN AHU yaitu Software.
- Pembelian Peralatan dan Mesin Berupa
- Belanja yang masih harus di bayar yaitu Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :
 1. Belanja Uang Makan Pegawai sisa bulan Desember tahun anggaran 2022 sebesar Rp.46.189.000 untuk 123 Pegawai.

2. Belanja Pegawai, kekurangan Gaji Sebesar Rp.1.307.650

- Pengadaan Paket Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran pada Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Tahun Anggaran 2022 Senilai Rp.1.286.400.000
- Pembelian peralatan dan mesin melalui E katalog pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Tahun Anggaran 2022 Senilai Rp.272.328.200.